

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selain itu, ada juga pengertian Akuntansi menurut beberapa ahli yaitu American Institute of Certified Public Accountants dalam Suhayati dan Anggadini (2009:1) menyatakan bahwa:

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut.

Sedangkan menurut Belkaoui (2006:50) yaitu:

Akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa. fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif dari entitas ekonomi, terutama yang bersifat keuangan dan dimaksudkan untuk bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan dalam menentukan pilihan diantara serangkaian tindakan-tindakan alternatif yang ada.

Pengertian akuntansi menurut Soemarso (2004) yaitu:

“.... proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.”

Definisi tsb mengandung 2 pengertian, yakni

1. Kegiatan akuntansi

Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.

2. Kegunaan akuntansi

Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan

Pengertian akuntansi menurut Kieso (2007:4) yang diterjemahkan oleh Handikad Wasilah yaitu “Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu informasi yang diberikan perusahaan melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan suatu kondisi perusahaan.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2015:1), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Menurut Kieso (2007) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas.

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2015:2) adalah sebagai berikut :

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut Farid dan Siswanto (2011:2) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial”.

Pengertian laporan keuangan menurut Munawir (2007:2) adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau efektivitas perusahaan tersebut.

Pengertian Laporan Keuangan menurut Baridwan (2004:17) adalah “Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.”

Sedangkan menurut Warren & Fees (2009:24) “Laporan keuangan adalah setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan, maka disiapkan bagi pemakai. Laporan akuntansi yang menghasilkan informasi demikian disebut laporan keuangan.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi mengenai keadaan suatu posisi perusahaan sehingga hasil yang didapat dari laporan keuangan tsb. dapat mempengaruhi pendapat dari pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu.

Jenis laporan keuangan menurut Harahap yang berjudul Analisis Kritis atas Laporan Keuangan (2004:106), menyatakan bahwa:

Jenis laporan keuangan terdiri dari jenis laporan keuangan utama dan pendukung, seperti; Daftar Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Harga Pokok Produksi, Laporan Laba Ditahan, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Kegiatan Keuangan.

Menurut Munawir yang berjudul *Analisa Laporan Keuangan* (2007:13) menyatakan bahwa :

Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal atau Laba yang Ditahan, walaupun dalam prakteknya sering diikutsertakan beberapa daftar yang sifatnya untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut. Misalnya, Laporan Perubahan Modal Kerja, Laporan Arus Kas, Perhitungan Harga Pokok, maupun daftar-daftar lampiran yang lain.

Menurut PSAK No.1 (2015:3) adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya, Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga.

Menurut SAK ETAP (2013:17), laporan keuangan yang lengkap meliputi:

1. Neraca.
Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas.
2. Laporan laba rugi.
Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan; beban keuangan; bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; beban pajak; laba atau rugi neto.
3. Laporan perubahan ekuitas;
Dalam laporan ini menunjukkan Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk

jumlah investasi, penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.

4. Laporan arus kas
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
5. Catatan atas laporan keuangan
yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan jenis-jenis laporan keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Laporan laba rugi, Laporan perubahan ekuitas, Neraca, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan.

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) Tujuan laporan keuangan adalah “memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.”

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Menurut SAK ETAP (2013), dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: “*asset*, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas.” Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

2.2.4 Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan menurut Martani (2012:33) adalah:

1. investor
Menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas.
2. Karyawan
Kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
3. Pemberian jaminan
Kemampuan membayar utang dan bunga yang akan memengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman.
4. Pemasok dan kreditur lain
Kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo.
5. Pelanggan
Kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya.
6. Pemerintah
Menilai bagaimana alokasi sumber daya.
7. Masyarakat
Menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengguna laporan keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang berkepentingan dalam penggunaan laporan keuangan baik investor, karyawan, pemerintah, dll.

2.2.5 Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan

Menurut SAK ETAP (2013:2) karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami.
Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah masyarakat yang mengerti tentang ekonomi dan keuangan.
2. Relevan
Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
3. Materialitas
Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

4. Keandalan
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
5. Pertimbangan Sehat
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.
6. Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.
7. Dapat Dibandingkan
Peguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Peguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.
8. Tepat Waktu
Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.
9. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat
Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya.

Berdasarkan penjelasan mengenai karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, pertimbangan sehat, dan lain-lain.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Menurut SAK ETAP (2013:1), SAK ETAP dimaksudkan untuk:

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik, namun entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh penggunaan eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga permeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 namun penerapan ini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan ini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. (<http://auliamharaniputri.blogspot.com/2013/06/>)

Berdasarkan penjelasan mengenai standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik diatas, dapat disimpulkan bahwa pengguna SAK ETAP merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan, dan penerapan SAK ETAP dapat dilakukan pada atau setelah 1 januari 2011.

2.4 Tujuan Penyusunan SAK ETAP

Menurut Martani (2011), Perusahaan dapat menggunakan SAK ETAP dikarenakan:

1. PSAK - IFRS *based* sulit diterapkan bagi perusahaan kecil menengah mengingat penentuan *fair value* memerlukan biaya yang tidak sedikit.
2. PSAK – IFRS rumit dalam implementasinya seperti kasus PSAK 50 dan PSAK 55 meskipun sudah disahkan tahun 2006 namun implementasinya tertunda bahkan 2010 sudah keluar PSAK 50 (revisi).
3. PSAK – IFRS menggunakan *principle based* sehingga membutuhkan banyak *professional judgement*.
4. PSAK – IFRS perlu dokumentasi dan IT yang kuat. Oleh karena itu SAK ETAP digunakan oleh perusahaan kecil menengah sebagai standar akuntansi keuangan perusahaan mereka.

Menurut Martani (2011), menyatakan bahwa “Penerapan SAK ETAP lebih sederhana dibanding penerapan PSAK umum yang mengacu pada IFRS karena SAK ETAP mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan.”

Sedangkan menurut Basir (2010), menyatakan bahwa:

Penerapan SAK ETAP bebas diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), jika ETAP belum memiliki rencana pengembangan ke depan, bisnisnya dijalankan secara sederhana, tidak terlalu membutuhkan pendanaan dari lembaga keuangannya, maka entitas ini tidak perlu menerapkan PSAK umum.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) memiliki 30 bab sejumlah 182 lembar yang terdiri dari ruang lingkup, konsep dan prinsip pervasif, penyajian laporan keuangan, neraca, lapoean laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan lain-lain. Di dalamnya mencakup juga standa rpelaporan akuntansi untuk masing-masing akun selayaknya SAK Umum. Berikut ini adalah pembagian bab dalam SAK ETAP.

Tabel 2.1 Pembagian Bab dalam SAK ETAP

BAB 1	Ruang lingkup
BAB 2	Konsep dan prinsip pervasif
BAB 3	Penyajian laporan keuangan
BAB 4	Neraca
BAB 5	Laporan laba rugi
BAB 6	Laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba
BAB 7	Laporan arus kas
BAB 8	Catatan atas laporan keuangan
BAB 9	Kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan
BAB 10	Investasi pada efek tertentu
BAB 11	Persediaan
BAB 12	Investasi pasa entitas asosiasi dan entitas anak
BAB 13	Investasi pasa joint venture
BAB 14	Properti investasi

BAB 15	Aset tetap
BAB 16	Aset tidak berwujud
BAB 17	Sewa
BAB 18	Kewajiban diestimasi dan kontijensi
BAB 19	Ekuitas
BAB 20	Pendapatan
BAB 21	Biaya Pinjaman
BAB 22	Penurunan Nilai Aset
BAB 23	Imbalan Kerja
BAB 24	Pajak Penghasilan
BAB 25	Mata Uang pelaporan
BAB 26	Transaksi dalam mata uang Asing
BAB 27	Peristiwa setelah akhir periode pelaporan
BAB 28	Pengungkapan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa
BAB 29	Ketentuan transaksi
BAB 30	Tanggal Efektif

(Sumber : Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik :2013)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan diterapkannya SAK ETAP agar pengusaha khususnya mikro, kecil dan menengah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih mudah dan dengan mengeluarkan biaya yang sedikit dalam pengimplementasiannya.

2.5 Manfaat SAK ETAP

Manfaat dari SAK ETAP menurut Martani (2011), yaitu :

1. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha.
2. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya.
3. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan manfaat penggunaan SAK ETAP menurut Martani diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat penggunaan SAK ETAP yaitu dapat menyajikan laporan keuangan yang andal meskipun pengimplementasiannya digolongkan mudah dibandingkan dengan SAK berbasis IFRS.

2.6 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

2.6.1 Pengertian Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

Menurut SAK ETAP (2013:156), pengertian peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah “Peristiwa-peristiwa, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan.”

1. Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian)
2. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian)

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa setelah akhir periode pelaporan merupakan peristiwa yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan.

2.6.2 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan yang memerlukan Penyesuaian

Menurut SAK ETAP (2013:156) peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian yaitu:

Entitas harus membuat penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, termasuk pengungkapan yang terkait, untuk mencerminkan peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian.

Contoh peristiwa setelah akhir periode pelaporan keuangan yang mengharuskan entitas untuk menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, atau mengakui pos-pos yang sebelumnya tidak diakui, menurut SAK ETAP (2013:157) yaitu:

1. Penyelesaian kasus pengadilan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan yang memutuskan entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Entitas menyesuaikan dilakukan atas kewajiban diestimasi terkait untuk kasus pengadilan tersebut sesuai dengan bab 18 kewajiban diestimasi dan kontinjensi atau mengakui penyisihan baru. Entitas tidak cukup hanya mengungkapkan kewajiban kontinjensi karena penyelesaian tersebut memberikan tambahan bukti yang harus dipertimbangkan sesuai dengan bab 18.
2. Penerimaan informasi setelah akhir periode pelaporan yang mengindikasikan suatu aset telah mengalami penurunan nilai pada akhir periode pelaporan, atau jumlah kerugian penurunan nilai sebelumnya yang diakui perlu disesuaikan. Misalnya:
 - a. Kebangkrutan suatu pelanggan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan umumnya menegaskan kerugian yang ada pada tanggal periode pelaporan dan entitas perlu menyesuaikan jumlah tercatat piutang dagang:
 - b. Penjualan persediaan setelah akhir periode pelaporan yang dapat memberikan bukti tentang harga jual persediaan pada akhir periode pelaporan.
3. Penentuan setelah akhir periode pelaporan atas biaya perolehan aset yang dibeli atau hasil penjualan aset sebelum akhir periode pelaporan.
4. Penentuan setelah akhir periode pelaporan atas jumlah pembayaran bagi hasil atau bonus, jika entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan, dimana pembayaran tersebut sebagai akibat dari peristiwa sebelum tanggal pelaporan (*lihat bab 23 imbalan kerja*).
5. Penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan kesalahan laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian dan pengungkapan diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus melakukan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan mengenai beberapa peristiwa yang terjadi setelah akhir periode pelaporan, sehingga dapat mencerminkan kejadian apa yang timbul setelah akhir periode pelaporan.

2.6.2.1 Kewajiban

Pengertian kewajiban menurut Kieso (2007) adalah:

Sebagai kemungkinan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.

Karakteristik Kewajiban Menurut Kieso (2007) yaitu:

1. Merupakan kewajiban saat ini yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer masa depan atau penggunaan kas, barang, atau jasa.
2. Merupakan kewajiban yang tak dapat dihindari
3. Transaksi atau kejadian lainnya yang menciptakan kewajiban itu harus telah terjadi.

Definisi Kewajiban menurut Soemarso (2004) adalah “Suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban merupakan suatu tugas ataupun tanggung jawab untuk melaksanakan suatu hal dimasa yang akan datang yang diakibatkan karena kejadian masa kini.

2.6.2.2 Kewajiban Diestimasi

Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Kewajiban diestimasi dapat dibedakan dari kewajiban lain, seperti utang dagang dan akrual, karena pada kewajiban diestimasi terdapat ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang harus dikeluarkan pada masa datang untuk menyelesaikan kewajiban diestimasi tersebut.

Menurut SAK ETAP (2013:89) Entitas mengakui kewajiban diestimasi jika:

1. entitas memiliki kewajiban kini sebagai hasil dari peristiwa masa lalu.
2. kemungkinan (lebih mungkin dibandingkan tidak mungkin) terjadi bahwa entitas akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada saat penyelesaian.
3. jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal.

Ketentuan mengenai kewajiban diestimasi menurut SAK ETAP (2013:90-92) yaitu :

Dalam kasus yang jarang terjadi, tidak dapat ditentukan secara jelas apakah terdapat kewajiban kini. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini jika (setelah mempertimbangkan semua bukti tersedia) terdapat kemungkinan bahwa kewajiban kini telah ada pada tanggal pelaporan.

Entitas mengakui kewajiban diestimasi tersebut sebagai kewajiban dalam neraca dan mengakui jumlah dari kewajiban diestimasi tersebut sebagai beban dalam laporan labarugi kecuali jika:

- a. Merupakan bagian dari biaya memproduksi persediaan (lihat paragraf 11.4) atau
- b. termasuk dalam nilai aset tetap sesuai dengan paragraf 15.7.

Kondisi pada paragraf 18.4(a) (kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu) berarti bahwa entitas tidak memiliki alternatif yang realistis untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Hal ini dapat terjadi ketika kewajiban dipaksakan secara hukum atau ketika entitas memiliki kewajiban konstruktif karena peristiwa masa lalu telah menimbulkan ekspektasi yang kuat dan sah kepada pihak lain sehingga entitas akan melaksanakan kewajiban tersebut. Kewajiban yang akan muncul dari tindakan entitas di masa depan (misalnya perilaku masa depan dalam menjalankan bisnis) tidak termasuk dalam kondisi yang diatur pada paragraf 18.4(a), tanpa mempedulikan kemungkinan keterjadiannya dan meskipun kewajiban tersebut adalah kewajiban kontraktual. Sebagai ilustrasi, karena tekanan komersial atau persyaratan hukum, entitas dapat memiliki intensi atau kebutuhan untuk melakukan pengeluaran operasional dengan cara tertentu di masa akan datang, misalnya dengan menggunakan saringan asap pada pabrik tertentu. Karena entitas dapat menghindari pengeluaran masa depan dengan pilihan tindakannya di masa yang akan datang, misalnya dengan mengubah metode operasinya, maka entitas tidak memiliki kewajiban kini untuk pengeluaran masa depan tersebut dan tidak ada pengakuan kewajiban diestimasi.

Pengakuan Awal

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban diestimasi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan.

- a. Jika kewajiban diestimasi yang sedang diukur menyangkut populasi yang terdiri atas sejumlah besar unsur, maka kewajiban ditentukan dengan menimbang berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitas terkait.
- b. Jika kewajiban yang diukur hanya satu, maka kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi merupakan estimasi terbaik dari kewajiban tersebut. Namun, dalam kasus demikian, entitas harus mempertimbangkan kemungkinan hasil lainnya. Jika kemungkinan hasil lain mengandung probabilitas yang sebagian besar lebih tinggi atau sebagian besar lebih rendah dibandingkan dengan kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi, maka yang dianggap estimasi terbaik adalah suatu nilai yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dibandingkan kemungkinan hasil yang probabilitasnya paling tinggi tersebut. Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah kewajiban diestimasi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang. Risiko tertentu atas kewajiban dicerminkan di tingkat diskonto atau estimasi jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban, tetapi bukan keduanya.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban diestimasi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat perusahaan menyelesaikan kewajibannya. Piutang penggantian akan disajikan dalam neraca sebagai aset dan tidak boleh saling hapus terhadap kewajiban diestimasi yang ada. Dalam laporan laba rugi, entitas diperbolehkan untuk melakukan saling hapus atas penggantian dari pihak lain terhadap beban yang berkaitan dengan kewajiban diestimasi tersebut. Entitas harus mengeluarkan keuntungan atas ekspektasi pelepasan aset dari perhitungan kewajiban diestimasi.

Pengakuan Selanjutnya

Entitas membebaskan kewajiban diestimasi hanya untuk pengeluaran atas kewajiban diestimasi yang telah diakui pada awalnya. Entitas menelaah kewajiban diestimasi pada setiap tanggal pelaporan dan melakukan penyesuaian untuk mencerminkan estimasi terbaik kini atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. Penyesuaian atas jumlah yang diakui sebelumnya, diakui di laporan laba rugi kecuali kewajiban diestimasi pada awalnya diakui sebagai bagian dari biaya perolehan persediaan atau aset tetap (lihat paragraf 18.6). Jika kewajiban diestimasi diukur pada nilai kini dari jumlah kewajiban yang diharapkan disyaratkan untuk diselesaikan, maka penyesuaian diskonto harus diakui sebagai biaya pinjaman.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban diestimasi merupakan kewajiban yang waktu serta jumlahnya belum pasti.

2.6.2.3 Kewajiban Kontinjensi

Pengertian Kewajiban Kontinjensi menurut Kieso (2007) yaitu:

Suatu kondisi, situasi atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastiaan mengenai keuntungan atau kerugian untuk perusahaan yang pada akhirnya akan diketahui ketika satu atau lebih kejadian dimasa depan terjadi atau tidak terjadi.

Menurut SAK ETAP (2013:92) pengertian kewajiban kontinjensi yaitu:

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti atau kewajiban kini yang tidak diakui karena tidak memenuhi salah satu atau kedua kondisi (b) dan (c) pada paragraf 18.4. Entitas tidak boleh mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Pengungkapan mungkin disyaratkan sesuai dengan paragraf 18.15

2.6.2.3.1 Keuntungan Kontinjensi

Menurut Kieso (2007), pengertian keuntungan kontinjensi (*gain contingencies*) yaitu “Klaim atau hak untuk menerima aktiva (atau memiliki kewajiban yang menurun) yang keberadaannya tidak pasti tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi sah.”

Menurut Kieso (2007), terdapat jenis keuntungan kontinjensi yang khas, yaitu:

1. Penerimaan yang mungkin atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus, dan lain sebagainya.
2. Kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas kelebihan pajak
3. Penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin menguntungkan.
4. Kerugian pajak yang dikompensasi ke depan.

2.6.2.3.2 Kerugian Kontinjensi

Pengertian Kerugian kontingensi (*loss contingencies*) menurut Kieso (2007) adalah “Situasi yang melibatkan ketidakpastian atas kemungkinan terjadinya kerugian.”

Menurut Kieso (2007), terdapat jenis keuntungan kontinjensi yang khas, yaitu:

1. Perkara pengadilan, kalim, dan pengenaan
2. Biaya jaminan dan garansi
3. Premi dan kupon
4. Kewajiban lingkungan

Menurut SAK ETAP (2013:94) terdapat pengungkapan yang merugikan, yaitu:

Dalam kasus yang benar-benar jarang terjadi, pengungkapan atas sebagian atau seluruh informasi yang disyaratkan oleh paragraf 18.14-18.16 dapat diekspektasi akan merugikan secara serius posisi entitas yang sedang berselisih dengan pihak lain mengenai kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi, atau aset kontinjensi. Dalam kasus tersebut, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi tersebut, tetapi harus mengungkapkan sifat umum dari kasus yang diperselisihkan, bersama dengan fakta dan alasan informasi tidak diungkapkan.

2.6.3 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan yang Tidak Memerlukan Penyesuaian

Menurut SAK ETAP (2013:156) peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian yaitu:

Entitas tidak boleh menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan atas peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian.

Contoh peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian menurut SAK ETAP (2013:158) yaitu:

Penurunan harga pasar investasi antara akhir periode pelaporan dan tanggal penyelesaian laporan. Penurunan harga pasar secara normal tidak berhubungan dengan kondisi investasi pada akhir periode pelaporan, tetapi menggambarkan keadaan yang timbul setelahnya. Oleh karena itu, entitas tidak boleh melakukan penyesuaian atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk investasi tersebut. Demikian halnya entitas juga tidak diperkenankan memutakhirkan pengungkapan jumlah investasi tersebut pada akhir periode pelaporan, walaupun entitas mungkin perlu membuat pengungkapan tambahan sesuai dengan paragraf 27.9

2.6.3.1 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan Yang Tidak Memerlukan Penyesuaian Mengenai Dividen

Peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian mengenai dividen menurut SAK ETAP (2013:158), yaitu “Jika entitas mengumumkan dividen kepada pemegang saham setelah akhir periode pelaporan, maka entitas tidak boleh mengakui dividen tersebut sebagai kewajiban pada akhir periode pelaporan.”

2.6.3.2 Dividen

Menurut Syamsuddin (2011) Pengertian dividen adalah sebagai berikut:

Dividen merupakan pembayaran yang diberikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan didalam perusahaan. Dalam hubungannya dengan jumlah pajak yang dibayarkan, maka pembayaran dividen berbeda dengan pembayaran bunga karena dividen tidak dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan.

Sedangkan menurut Darmadji dan Fakhrudin (2001) “Dividen adalah pemabagian sisa laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham.”

Sehingga dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dividen merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam perusahaan, karena menyangkut pemegang saham yang notabene merupakan sumber modal dari perusahaan tersebut. Investor dalam menginvestasikan dananya kedalam instrumen saham tentunya menginginkan return yang tinggi. Return dari saham dapat diperoleh dari capital gain maupun dari dividen.

2.6.3.3 Kebijakan Dividen

Menurut Sartono (2001), mendefinisikan kebijakan dividen sebagai “Keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam *retained earnings* guna membiayai investasi di masa datang”.

Menurut Kadir (2010), “Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen (*dividend payout ratio*) menentukan jumlah laba yang dapat ditahan sebagai sumber pendanaan. Semakin besar laba ditahan semakin sedikit jumlah laba yang dialokasikan untuk pembayaran dividen.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan deviden adalah keputusan apakah perusahaan akan membagikan laba kepemegang saham atau tidak.

2.6.4 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan Yang Tidak Memerlukan Penyesuaian Mengenai yang Umumnya Memerlukan Pengungkapan

Menurut SAK ETAP (2013:158-159) dalam pengungkapan tanggal penyelesaian laporan keuangan, maka:

1. Entitas harus mengungkapkan tanggal penyelesaian laporan keuangan.
2. Entitas harus mengungkapkan untuk setiap kategori peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Sifat dari peristiwa
- b. Estimasi dampak keuangannya atau suatu pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dilakukan.

Contoh Peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian yang umumnya memerlukan pengungkapan, menurut SAK ETAP (2013:159) yaitu:

1. Pengumuman rencana untuk menghentikan suatu operasi;
2. Pembelian aset utama, pelepasan atau rencana pelepasan aset utama, atau pengambilan aset utama oleh pemerintah;
3. Kerusakan pabrik produksi utama akibat kebakaran;
4. Pengumuman atau implementasi awal atas restrukturisasi utama;
5. Perubahan abnormal harga aset atau kurs mata uang asing;
6. Menjadi pihak yang memberikan komitmen atau memiliki kewajiban kontinjensi yang signifikan, misalnya memberikan jaminan signifikan;
7. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang semata-mata timbul karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan.

Berdasarkan penjelasan mengenai peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian tetapi memerlukan pengungkapan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus melakukan pengungkapan mengenai beberapa peristiwa yang terjadi setelah akhir periode pelaporan untuk mencerminkan keadaan yang terjadi pada saat itu.

2.7 Penentuan Penilaian Dari Hasil Kuisisioner

Metode penilaian data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melalui kuisisioner yang bersifat tertutup dengan diberikan alternative jawaban ya dan tidak. Menurut Harry Kachfy (2009), % penentuan penilaian dari hasil kuisisioner yaitu dengan membagi total jawaban Ya dengan total seluruh jawaban pada kuisisioner kemudian dikali dengan presentase sebesar 100%. Hasil dari Persentase tersebut kemudian dilihat dalam golongan sangat kurang memadai, kurang memadai, cukup memadai, dan sangat memadai.

Berikut penggolongan persentase menurut Harry Kachfy (2009) :

0% - 25% = Sangat Kurang Memadai

26% - 50% = Kurang Memadai

51% - 75% = Cukup Memadai

76% - 100% = Sangat Memadai

Rumus :

$$\% = \frac{\Sigma Ya}{\Sigma Jawaban} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pencarian persentase menurut Harry Kachfy, dapat disimpulkan bahwa dalam pencarian persentase dapat dilakukan dengan cara dengan membagi jumlah jawaban ya dengan jumlah seluruh jawaban tidak kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk jawaban ya atau untuk jawaban tidak diberikan skala yang berbeda. Kemudian menggolongkan hasil persentase kedalam golongan yang telah dikemukakan dalam teori Harry Kachfy.